

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, penelitian, dan pengumpulan data dari permasalahan yang terjadi diatas. Penulis ingin menyampaikan bahwa proses manajemen advokasi transnasional LGBT merupakan agenda yang dilakukan oleh jaringan-jaringan LGBT dengan tujuan mengedepankan hak-hak asasi para penganut LGBT. Mereka bekerjasama untuk memberikan pengaruh kepada kebijakan pemerintah Indonesia, agar pemerintah Indonesia mau terbuka dan memberikan hak-hak yang sama sebagai warga negara yang sah bagi para penganut LGBT.

Pada penelitian ini penulis ingin menyampaikan langkah advokasi yang dilakukan transnasional LGBT di Indonesia. Tertutupnya akses para aktivis advokasi dan NGO LGBT di Indonesia membuat mereka harus melakukan kerjasama dengan aktivis advokasi dan NGO LGBT internasional agar pemerintah Indonesia mau mendengarkan dan melakukan tindakan terhadap fenomena LGBT ini. Para aktivis juga membutuhkan bantuan untuk dapat meyakinkan pemerintah Indonesia agar menghapus semua tindak diskriminasi terhadap para penganut LGBT di Indonesia. Konsep *transnational advocacy networks* digunakan untuk mewujudkan advokasi dapat berjalan dan

memberikan pengaruh terhadap kebijakan dan keputusan pemerintah Indonesia. Aktivis-aktivis LGBT di Indonesia sangat gencar melakukan advokasi, dengan bantuan NGO internasional dan membangun sebuah jaringan yang saling berkaitan agar masyarakat Indonesia juga dapat melihat teman-teman para penganut LGBT juga termasuk masyarakat Indonesia. Stigma negatif yang masih tertanam di masyarakat Indonesia membuat banyak sekali tindakan diskriminasi terhadap para penganut LGBT. Masyarakat Indonesia menganggap bahwa LGBT tidak sesuai dengan budaya dan norma-norma yang ada di Indonesia.

Jaringan transnasional ini dibangun dengan atas dasar penghapusan diskriminasi dan tindak kekerasan terhadap para penganut LGBT di Indonesia yang mengacu pada *Yogyakarta Principles*, DUHAM, dan CEDAW ingin memberikan perlindungan kepada para penganut LGBT, dan memberikan dukungan moril kepada mereka.

Tindakan dan program yang dilakukan adalah berupa ikut berpartisipasi dan mengajak organisasi-organisasi yang ada di Indonesia dalam forum internasional tentang permasalahan gender dan seksualitas untuk meningkatkan kehidupan para penganut LGBT di seluruh penjuru dunia, memberikan pengetahuan tentang fenomena LGBT di organisasi internasional, jaringan yang tersebar dan komunikasi dengan organisasi LGBT lainnya, penyuluhan, bimbingan, pengkajian, dan penelitian serta membantu menyuarakan pandangan terhadap fenomena LGBT.

Memberikan edukasi kepada seluruh mitra jaringan, memberikan edukasi kepada para aparatur-aparatur pemerintah Indonesia, memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia baik melalui diskusi, workshop, event-event tertentu ataupun melalui tulisan di web, sosial media, bulletin, majalah, dan sebagainya.

Menawarkan dukungan hukum kepada para pengikut LGBT dan organisasi LGBT di Indonesia, menginformasikan, dan memberikan pengetahuan tentang LGBT. Mereka juga bekerja untuk mereformasi politik Indonesia melalui lobi-lobi dan kampanye.

Disinilah tugas para aktivis LGBT untuk mengubah stigma tersebut. Dengan teori konstruktivis para aktivis LGBT ini mencoba untuk memberikan pemahaman akan identitas seksual yang berbeda ini, bahwa sejatinya norma-norma yang berlaku di Indonesia itu dapat berubah dengan seiring berjalannya waktu. Norma terbentuk karena adanya komunikasi, cara pandang masyarakat dan lingkungan yang terus berkembang. Jadi mau tidak mau kita sebagai masyarakat juga harus bisa berkembang dan terbuka dalam hal pemikiran tentang fenomena LGBT ini.

Isu HAM yang menjadi sorotan utama dalam fenomena LGBT ini, seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah Indonesia masih menutup mata dengan fenomena LGBT. Pemerintah Indonesia tidak memprioritaskan fenomena LGBT ini kedalam pengambilan keputusan. Dengan sikap seperti ini dapat dikatakan bahwa sebenarnya pemerintah Indonesia menolak LGBT. Tingkat

kriminalisasi dan diskriminasi yang masih terus terjadi tanpa ada pencegahan dan sikap yang tegas dari pemerintah membuat aparatur-aparatur negara dan pihak berwajib bertindak sewenang-wenang tanpa melihat konstitusi tertinggi di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar.

Peran jaringan yang terbentuk sangatlah baik dalam melakukan pendekatan, baik secara individu, kelompok, maupun pemerintah. Melalui lembaga-lembaga internasional, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, dan jaringan-jaringan internasional, proses advokasi dapat berjalan, berkembang, dan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Di dalam sebuah lembaga terdapat norma-norma dan mekanisme yang dapat mengatur, memberi, dan mempengaruhi setiap tindakan dan kebijakan negara-negara lain.

Mungkin banyak pertimbangan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menghadapi fenomena LGBT ini. Indoensia yang mayoritas Muslim pasti menolak keras LGBT bisa tumbuh dan berkembang di Indonesia, namun tidak dapat disangkal bahwa perkembangan LGBT di Indonesia berkembang dengan pesat. Disatu sisi Indonesia yang merupakan bagian dari OKI yang secara jelas dan terang menolak LGBT, dan Indonesia juga termasuk anggota dari PBB yang memiliki kebijakan untuk menjunjung tinggi hak-hak para penganut LGBT.

Dengan keadaan yang seperti ini membuat para penganut LGBT mudah diserang, tidak adanya perlindungan terhadap para

pengikut LGBT membuat mereka menjadi waspada dan tidak mudah untuk menunjukkan identitasnya. Entah sampai kapan pemerintah akan bersikap seperti ini. Penulis berharap pemerintah Indonesia tidak lagi tertutup terhadap fenomena LGBT ini.

Rekomendasi

Pemerintah diharapkan mengakui secara resmi keberadaan kelompok LGBT yang memiliki beragam orientasi seksual dan identitas gender sebagai bagian integral dalam masyarakat Indonesia, di samping juga menghargai dan melindungi hak asasi manusia kelompok LGBT yang setara dengan warga Indonesia lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional melalui mekanisme HAM yang sudah ada.

Hentikan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan yang didasarkan pada orientasi seksual dan identitas gender, baik yang dilakukan oleh pejabat negara (termasuk petugas kepolisian dan pamong praja) maupun oleh masyarakat umum (termasuk organisasi berbasis agama) dengan mengusulkan undang-undang atau kebijakan anti diskriminasi.

Prioritaskan peninjauan kembali semua kebijakan negara (termasuk Perda) yang secara langsung maupun tidak langsung mengancam hukuman pidana dan mendiskriminasikan kelompok LGBT, serta harmonisasikan undang-undang, kebijakan dan praktek hukum nasional dengan Prinsip-Prinsip Yogyakarta.

Mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar menyediakan layanan kesehatan untuk kelompok LGBT, termasuk pemuda LGBT, serta membina hubungan kerja sama dengan kelompok-kelompok Lesbian, Biseksual dan Transgender (LBT) dalam program-program yang mendukung hak mendapatkan layanan kesehatan seksual dan reproduksi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal/Thesis/Skripsi:

- Abigail, Salina. 2012. The Formation of National Network of Gay Men, Transgender. Jakarta: GWL-INA
- Adam, B. D. 1987. The Rise of a Gay and Lesbian Movement. Boston: Twayne Publisher
- Adhiati, Triana. 2007. Gerakan Feminis Lesbian Studi Kasus politik Amerika 1990-an. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Agustinus, Nur, et al. (eds). 2006. Gay di Masyarakat. Surabaya: GAYa Nusantara edisi khusus 1
- A. Hoey. Brian. 2003. Nationalism in Indonesia: Building Imagined and Intentional Communities through Transmigration. Ethnology Vol.42 No.2 Spring, p.112
- Alexander, Jonathan. 2004. Bisexuality and Transgenderism: InterSEXions of The Others. Haworth Press.
- Al-Fayyald, Muhamad. 2005. Derrida. Yogyakarta: LKS Alisjahbana. 2005. Sisi Gelap Perkembangan Kota Yogyakarta: Laksbang PRESSINDO.
- Altman, D. 1971. Homosexual: Oppression and Liberation. New York: Outerbridge & Dienstfrey
- Andrew, Belonsky. 2007. The Gay Pride Issues. New York: Queerty

- Azizah, Nur. 2013. Advokasi Kuota Perempuan di Indonesia. Yogyakarta: LP3M
- Barker, C. 2004. Cultural Studies, Teori & Praktik. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Baylis, John. 2004. The Globalization of World Politics: An Introduction in International Relations. London: University Press
- Beauvoir. de Simone. 1964. The Second Sex. Alfred A. Knoph. New York.
- Bocock, Robert. Pengantar Komprehensif Untuk Memahami Hegemoni, Yogyakarta: Jalasutra.
- Boellstroff, Tom. 2005. The Gay Archipelago. Seksualitas dan Bangsa di Indonesia. Inggris. Princeton University Press, 41 William Street, Princeton, New Jersey 08540 Di Inggris: Princeton University Press Inggris
- Brooks, Ann. 2009. Posfeminisme & Cultural Studies Sebuah Penganter Paling - Komprehensif. Jalasutra.
- Bullough, Vern. 2005. When Did The Gay Rights Movement Begin. New York
- Burchill, Scoot. 2005. Theories of International Relation. London: Palgrave Macmillan
- Byrne. A. 1995. Disney and His World. London: Yogyakarta: Routledge.

- Davis, Flora. 1991. Moving the Mountains, The Women's Movement in America since 1960. New York: A Touch-stone Book, Simon & Schuster.
- Donaldson, Stephen. 1995. The Bisexual Movement's Beginnings in the 70's. New York: Harrington Park Press
- Dynes, Wayne R. 2011. Pride Homolexis. New York: The Wayback Machine
- Effendi dan Evandri Taufani S. 2007. Hak Asasi Manusia- Aspek Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia
- Evan, Sara. 1979. Personal Politics: The Roots of Women's Liberation in the Civil Right Movement and the New Left, Vintage Books. New York: A Division of Random House.
- Errington, J. Joseph. 1998. Shifting Languages: Interactions and Identity in Javanese Indonesia. Cambridge University Press
- Featherstone, M. 1991. Consumer Culture and Postmodernism. London and Newbury Park: CA: Sage.
- Gemmil, Barbara dan Abimbola, Bamide Izu. 2002. The Role of NGOs and Civil Society in Global Environmental Governance. At <http://www.envnet.org/wp-content/uploads/2013/09/gemmil.pdf>
- Giddens, A. 1984. The Constitution of Society. Cambridge: Polity Press.
- Giddens, A. 1991. Modernity and Self-Identity. Cambridge: Polity Press.

- Gillespie, M. 1995. Television, Etnicity and Cultural Change. London and New York: Routledge.
- Glover, David dan Cora Caplan. 2000. Genders. London: Routledge.
- Gramsci, A. 1968. Prison Notebooks. London: Lawrence & Wishart.
- Gramsci, A. 1971. Selection from the Prison Notebooks, eds Q. Hoare and G. NowellSmith. London: Lawrence & Wishart.
- Gunderloy, Mike. 1989. Acronyms, Initialism and Abbreviations Dictionary. Gale Research Co
- Hall, S. 1992. The Question of Cultural Identity' in S. Hall, D. Held and T. McGrwe (eds) Modernity and Its Futures. Cambridge: Polity Press.
- Hall, S. 1996. For Allon White: Methaphors of Transformation in D. Morley and D KChen (eds) Stuart Hall. London: Routledge.
- Hekmari, Gert; Oosterhuis, Harry; Steakley, James. 1995. Letfist Sexual Politics and Homosexuality. Journal of Homosexuality
- Herliani, Indri. 2008. Pola Komunikasi dan Identifikasi Kaum Lesbian (skripsi). Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi The London School of Public Relation.
- Hubert C, Kennedy. 1980. The third sex theory of Karl Heinrich Ulrich, Journal Homosexuality. Fall Winter

- Ibrahim, Idi Subandy. 2007. Budaya Populer Sebagai Komunikasi, Dinamika Popscape dan Mediascape di Indonesia Kontemporer. Yogyakarta. Jalasutra.
- Ikbar, Yanuar. 2014. Metodologi & Teori Hubungan Internasional. Bandung: PT. Medika Aditama
- Irwanto. 2015. Hak Atas Kesehatan Dan Perlindungan Sosial (Jaminana Sosial) Bagi Disabilitas di Indonesia
- Jackson, Robert, dan Sorensen, George, Pengantar Hubungan Internasional, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Jedvik, Hanna. 2007. Lagen Om Konsbyte Ska Uterdas Jurnal Perempuan, “Rahasia Sunyi: Gerakan Lesbian di Indonesia, “Jurnal Perempuan 58, hal 59-72
- Judith, Butler. 1990. Gender Trouble. Routledge
- Judith, Butler. 1993. Bodies That Matter: On the Discursive Limits of Sex. Routledge
- Kamilia Manaf. 2010. Perlu Suport Group dalam Mendukung Identitas Homoseksual.
- Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia. 2001. Buku Manual Gender dan Pembangunan.
- Kartono, K. 2009. Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual. Yogyakarta: Jala Sutra
- Koentjaraningrat. 2000. Pengantar ilmu Antropologi. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- Kristen, Esterberg. 1994. Gender and Society “From Accommodation to Liberation: A Social Movement Analysis of Lesbian in The Homophile Movement
- Kugelman, Dieter. The Protection of Minorities and Indigenous Peoples Respecting Cultural Diversities. Max Planck Yearbook of United Nations Law, Volume 11, 2007.
- Koninklijke
- Kutha Ratna, Nyoman. 2004. Penelitian Sastra. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kutha Ratna, Nyoman. 2004. Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra, dari Strukturalisme Hingga Postrukturalisme, Perspektif Wacana Naratif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Larasati, Budi. 2013. Membuat Ruangan bagi Orientasi Seksual dan Identitas Gender dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional: Sebuah Perkenalan pada PrinsipYogyakarta. USAID: Laporan Nasional Indonesia: Hidup Sebagai LGBTI di Indonesia Tahun 2013
- Linklater, Scoot Burchill dan Andrew. 2009. Theories of International Relation. New York: ST Martin’s Press
- Mantra, Ida Bagoes. 2004. Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offest.
- Margaret E Keck, Kathryn Sikkink. 1998. Advocacy Networks in Internastional Politics. Ithaca, United State: Cornell University Press

- Marotta, Toby. 2006. *The Politics of Homosexuality*. Boston
- Martin, Robert. 1972. Quakers Come Out at Conference. *The Advocate*
- Massey, D. 1994. *Space, Place and Gender*. Cambridge: Polity Press.
- Matzner. 2004. Stonewall Riots. *The Wayback Machine*
- Mike, Gunderloy. 1989. Acronyms, initialisms & abbreviations dictionary. Gale Research Co
- Milles, Matthew B dan Huberman, A.M. 1992. *Analisis Data Kualitatif, Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, Lexy. J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulia, Siti Musda. 2003. Memahami Homoseksualitas, Membongkar Yang Tersembunyi: Mencoba Menggali Suara Lain Homoseksual dalam Islam, dalam Gerbang, No. 14, Vol. V 2003
- Nawawi, Hadari dan Martini Hadari. 1995. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM Press.
- News, Gay. 1978. *Peace News*. London: Gay News
- Nicholson, L. (ed) 1990. *Feminism/Postmodernism*. London and New York: Routledge.
- Nugroho, Dr. Riant. 2008. *Gender dan Administrasi Publik, Studi tentang Kesetaraan Gender dalam Administrasi Publik*

- Indonesia Pasca Reformasi 1998-2002. Yogyakarta: Pustaka Desain.
- Piliang, Yasra Amir. 1999. Hiper-realitas Kebudayaan. Yogyakarta: LPIS
- Piliang, Yasraf Amir. 2004. Dunia yang Dilipat, Tamasya Melampaui Batas-batas Kebudayaan. Yogyakarta: Jalasutra.
- Rahmat. 1997. Generasi di Tengah Arus perkembangan Informasi (tesis). Denpasar: Universitas Udayana.
- Relph, E. 1976. Place and Placelessness. London: Pion.
- Richard T. Schefer, Sociology: Brief Introduction 6th Edition, (NY: Mac Grawhill, 2006), h. 241
- Ritzer, George. 2004. Teori Sosial Pasmodern. Kreasi Wacana. Yogyakarta.
- Ritzer, George. 2008. Teori Sosial Postmodern. Yogyakarta: Juxtapose Research and Publication Club bekerja sama dengan Kreasi Wacana
- Rueda, Marisa. Rodriguez, Marta. Watkins, Susan Alice. 2007. Feminisme Untuk Pemula. Resist Book. Yogyakarta.
- Sarlito. 1997. Gaya Hidup Kawula Muda Masa Kini (tesis). Denpasar. Universitas Udayana.
- Seamon, D. 1979. A. Geography of the Life World. London: Croom Helm.
- Shotter, J. 1993. Conversational Realities. London and Newbury Park: CA Sage.

- S Nye, Josep. 1971. Transnational Relations and World Politics.
New York: MIT Press
- Spradley, James.1997. Metode Etnografi. Yogyakarta: Tiara
Wacana.
- Sturrock, John (ed). 2004. Strukturalisme Post-Strukturalisme.
Surabaya: Jawa Post Press
- Sujaya. 2004. Profil Pembangunan Kelurahan Kuta.
- Sumiari, Endang. 2004. Jender dan Feminisme. Yogyakarta: Jala
Sutra.
- Susilo. 2006. T-shirt sebagai Refrensi Gaya Hidup Remaja Kota
Medan (tesis). Denpasar: Universitas Udayana.
- Sutrisno, Evi Lina. (eds). 2003. Mendengar Suara Lesbian
Indonesia. Ardhanary Institue. Jakarta
- Syarifah. 2006. Keberubahan Perempuan dalam Pornografi.
Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- The Guardian. 2010. Tories Come Out in Force at Gay March.
London: The Guardian London
- Tomatimasang, Roem, Mansour Fakih dan Toto, Raharjo. 2000.
Merubah Kebijakan Publik. Yogyakarta: Read Books
- Trust. B. L. 2012. Gay Liberation Front Annual Conference in
1972. Birmingham
- Uno, Hamzah B. 2008. Orintasi Baru Dalam Psikologi
Pembelajaran. Jakarta: Yayasan Kota Sika.
- Victoria, Brittain. 1970. An alternative to Sexual Shame: Impact
of The Militancy Among Homosexual Groups. The Times

- Weeks, J.1990. The Value of Difference in J Rutherford (ed) Identity: Community, Culture, Difference. London: Lawrence & Wishart.
- Zainul Hamdi, Ahmad. 2003. Membongkar Yang Tersembunyi: Mencoba Menggali Suara Lain Homoseksual dalam Islam, dalam Gerbang, No. 14, Vol. V

Website

Admin. Perempuan Lesbian. Available from:

<http://www.seksualitas.net/menyembuhkan-mengobati-lesbian.htm>.

Ang, I and Stratton, J. 1996. On the Impossibility of a Global Cultural Studies: “British” Cultural Studies in an International Framein D. Morley and D.K Stuart Hall. London: Routledge.

Anonim. Lesbian, Apa dan Bagaimana Cara Mengobatinya? 2009. available at: <http://www.konseling.net>.

Anonim. Penyebab Menjadi Homoseks. Available at :

<http://ilc2009.wordpress.com/2009/07/01/perempuan-lesbian-diindonesia>

Ardhanaryinstitute. Memahamai Teori Queer. 2015. At <http://ardhanaryinstitue.org/index.php./2015/11/15/memahami-teori-queer>

Arus Pelangi. 2017. Pernyataan Sikap Bersama Kasus Atlantis Gym. At <http://www.aruspelangi.org/siaran-pers/pernyataan-sikap-bersama-kasus-atlantis-gym/>

- Boykin, Keith. 2000. Gay and Lesbian Movements in the United States. Available from : Africana.com web site, <http://www.africa.com/articles>
- Jancokan. Penyebab Menjadi Homoseks. Available from : <http://www.kaskus.com>.
- Kabar, LGBT. 2016. Sejarah Lesbianisme. At <https://kabarlgbt.org/2016/01/21/sejarah-lesbianisme>
- Lgbt, kabar. 2016. Sejarah LGBT. At <http://www.Kabar.lgbt.org/tag/sejarah-lgbt/>
- Qidal. 2015. Jumlah Populasi Gay di Indoensia. At <http://www.sixpackmagazine.net/2015/11/jumlah-populasi-gay-di-indonesia.htm>
- UNDP. 2016. Report Hdr UNDP. At <http://hdr.undp.org/en/2016-report>
- Theory.Org.UK. 2007. This idea of identity as free floating. At <http://www.theory.org.uk/ctr-butl.htm>
- Wardhanahendra. 2011. Sekilas Tentang LGBT di Yogyakarta. At <http://www.kompasiana.com/wardhanahendra/sekilas-tentang-lgbt-di-yogyakarta>
- http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/02/160223_indonesia_demonstrasi_lgbt
- <http://digilib.unila.ac.id/9696/14/BAB%20II.pdf>
- <http://www.tempo.co/read/news/2012/05/09/058402606/Rektor-UGM-LarangDiskusi-Irshad-Manji>

<http://jogja.tribunnews.com/2016/02/25/sri-sultan-hb-x-minta-warga-diy-toleran-terhadap-lgbt?page=2>

http://www.kompasiana.com/wardhanahendra/sekilas-tentang-lgbt-di-yogyakarta_56a96d3e5497733005f25ded

<http://pelangijogja.tripod.com/>

<http://www.plush.or.id/2016/05/berita-imbauan-terkait-pemberitaan-lgbt.html>

<http://www.plush.or.id/2016/05/berita-pengantar-seksualitas-dan.html>

<http://www.rappler.com/indonesia/123469-demo-perlindungan-hak-lgbt-yogyakarta-ricuh>

LAMPIRAN



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Latuharhari No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 62-21-392 5230, Fax : 62-21-392 5227 / 391 2026,
Website : www.kommasham.go.id

SIARAN PERS

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Tentang LGBT

Jakarta, 29 Januari 2016

Hak atas Rasa Aman dan Hak atas Kebebasan untuk Berkumpul dan Berserikat Komunitas LGBT belakangan ini menjadi diskursus yang mengemuka. Hal ini dipicu oleh pernyataan para Pejabat Publik yang menimbulkan stigma dan diskriminasi terhadap Komunitas LGBT. Sesungguhnya hak-hak diatas telah dijamin dalam Konstitusi, dalam UUD 1945 Pasal 28.

Pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo, melalui Program Nawacita telah bertekad untuk memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga. Pernyataan para Pejabat Publik akhir-akhir ini terkait LGBT justru bertentangan dengan tujuan Nawacita tersebut dan memicu terjadinya kekerasan terhadap Komunitas LGBT di berbagai daerah di Indonesia. Pernyataan para Pejabat Publik, yang kemudian secara terus-menerus dikutip oleh Media, memperberat kehidupan Komunitas LGBT yang telah mengalami beragam diskriminasi dan stigma. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Komnas HAM pada 2015, Komunitas LGBT terutama mengalami kesulitan dalam penuhan hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan, hak untuk mendapatkan perlakuan hukum yang adil, dan hak atas kebebasan berekspresi. Dalam penelitian tersebut diketahui bahwa media berperan besar dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait LGBT.

Pada tahun 2006 di Yogyakarta diadakan pertemuan para ahli HAM internasional untuk menyikapi berbagai penyalahgunaan kekuasaan, kekerasan, dan diskriminasi terhadap kelompok seksual minoritas. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan yang disebut **Prinsip-prinsip Yogyakarta** dan berisi **Penerapan Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dalam Hubungannya dengan Orientasi Seksual dan Identitas Gender**. Prinsip Yogyakarta ini merupakan panduan universal untuk menerapkan hukum hak asasi manusia internasional untuk pelanggaran yang dialami oleh kelompok seksual minoritas untuk memastikan jangkauan universal perlindungan hak asasi manusia. Prinsip Yogyakarta ini juga menjadi dasar Komnas HAM dalam mendorong terpenuhinya hak-hak kelompok LGBT oleh Negara.

Sesungguhnya keberadaan Komunitas LGBT telah diakui oleh Negara, antara lain dengan adanya Peraturan Menteri Sosial No. 8/2012 terkait Kelompok Minoritas, yang menyebutkan adanya

gay, waria dan lesbian; serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27/2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Kerja Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahunan 2015 yang memasukkan gay, waria dan lesbian sebagai kelompok sasaran yang menerima manfaat dari program coda departemen tersebut. Namun demikian peraturan peraturan Negara tersebut perlu disempurnakan dan diperbaiki agar sesuai dengan semangat yang tertuang dalam Prinsip-prinsip Yogyakarta. Pemerintah harus membuat peraturan yang dapat memastikan setiap program kementerian terkoordinasi satu sama lain, menghafauis ego sektoral dan memastikan program-program yang melibatkan LGBT didasarkan pada pemenuhan HAM (*human rights based policy*). Diluar kekurangan peraturan-peraturan ini, beberapa langkah pemimpin daerah seperti Bupati Batang, Bojonegoro patut diapresiasi. Mereka memiliki komitmen dalam upaya memberikan perlindungan terhadap kelompok LGBT sebagai kelompok yang rentan diskriminasi dan kekerasan oleh pihak lain. Inisiatif ini patut direplikasi ke dalam peraturan nasional hingga negara benar-benar hadir dalam upaya untuk memberikan perlindungan dan memastikan setiap warga negara tidak boleh didiskriminasi atas dasar apapun sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Berkaitan dengan hal di atas Komnas HAM mendesak Negara untuk hadir memberikan perlindungan dan pemenuhan hak Komunitas LGBT sebagaimana yang tertuang dalam Konstitusi dan program Nawacita. Untuk itu Komnas HAM mendorong:

1. Para Pejabat Publik untuk menghentikan memberikan pernyataan-pernyataan negatif yang memicu timbulnya kekerasan dan pelanggaran HAM bagi Komunitas LGBT serta mengambil kebijakan dan program yang mengacu pada Prinsip-prinsip Yogyakarta terkait Komunitas LGBT;
2. Media Massa untuk memberitakan secara berimbang dan tidak memberitakan hal-hal yang menimbulkan stigma dan kekerasan bagi Komunitas LGBT;
3. Masyarakat untuk tidak melakukan diskriminasi dan kekerasan kepada Komunitas LGBT.

Muhammad Nurkhoiron

(Komisioner Komnas HAM,
Koordinator Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan,
Pelapor Khusus HAK MINORITAS di Komnas HAM)
(Kontak Person, 081514027018)

Wawancara dilakukan di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jalan Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Hari Kamis 04 April 2018 pukul 10:59 WIB. Narasumber Eka Crhristiningsih T, salah seorang Human Rights Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.



